

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bogor

By Ginung Pratidina

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bogor

Motor Vehicle Taxpayer Compliance in Bogor City

Ginung Pratidina¹, Mahpudin²

¹Fakultas Ilmu sosial dan ilmu politik, Universitas Djuanda Bogor

²Universitas Djuanda Bogor, Universitas Djuanda Bogor

Co Author: ginung.pratidina@unida.ac.id, gimabin65@gmail.com

Abstrak

Latar Belakang: Penegakan hukum dalam perpajakan kendaraan bermotor diwujudkan melalui pemberian suatu sanksi yaitu berupa pengenaan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor kepada wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran sesuai jatuh tempo yang terdapat pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Pajak kendaraan bermotor ini adalah salah satu pajak daerah yang terangkai dalam Undang-Undang mengenai perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Undang-Undang No. 33 tahun 2004, yang dinyatakan sebagai bagian dari pajak daerah dan dengan peraturan pemerintah nomor 3 tahun 1957, pajak diserahkan pada daerah untuk dipungut dan diurus, dan selanjutnya sebagai sumber keuangan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau sering dikenal dengan istilah SAMSAT merupakan salah satu sarana dari pengawasan pajak kendaraan bermotor yang telah memberikan kontribusi dalam penerimaan pajak negara, secara umum SAMSAT diberikan tugas untuk memberikan pelayanan dan pengawasan terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor (Suryadi, 2006 : 3). Kendaraan bermotor semakin banyak dimiliki oleh setiap lapisan masyarakat, bertambahnya kendaraan bermotor menyebabkan jumlah Wajib Pajak (WP) kendaraan bermotor semakin meningkat setiap tahunnya, dapat dilihat dari jumlah wajib pajak yang terdaftar di SAMSAT Kota Bogor dari tahun 2016-2018 jumlah wajib pajak selalu mengalami kenaikan.

Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang mengacu pada variable X (sanksi pajak) yang dikemukakan oleh Erly Suandy (2011) meliputi : 1) Kedisiplinan Wajib Pajak (*Tax Discipline*) dan 2) Kemauan Membayar Pajak Dari Wajib Pajak. Serta pada variable Y (kepatuhan wajib pajak yang dikemukakan oleh Siti Kurnia Rahayu dan Ita Salsalina *lingga* (2009) meliputi :

- 1) Kepatuhan Mendaftarkan Diri;
- 2) Kepatuhan dalam Penghitungan dan Pembayaran Pajak Terutang;
- 3) Kepatuhan Dalam Pembayaran Tunggal Pajak.

Metodologi: Penelitian ini menggunakan metode sampel purposive sampling adalah salah satu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Untuk menentukan jumlah sampel yang akan diambil digunakan rumus Slovin dengan hasil sampel 100 responden. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui observasi langsung, menggunakan angket dan wawancara untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih mendalam, serta menggunakan metode korelasi *rank spearman* untuk mengetahui pengaruh dari sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil: Hasil penelitian menunjukkan sanksi pajak (variable X) memperoleh nilai 4,12 dalam kategori Baik, dan kepatuhan wajib pajak (variable Y) memperoleh nilai 3,89 dalam kategori Baik. Berdasarkan hasil dari korelasi *Rank Spearman* menunjukkan hasil 0,6 yang artinya tingkat hubungan termasuk dalam kategori Kuat. Dan dari perhitungan koefisien determinasi adalah

sebesar 36 % yang diartikan bahwa terdapat atau adanya ⁴ pengaruh yang kuat antara Sanksi Pajak dan Kepatuhan wajib Pajak di SAMSAT Kota Bogor.

²¹
Kata Kunci: Pengaruh, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, SAMSAT Kota Bogor.

I. PENDAHULUAN

Dewasa ini Pembangunan di Indonesia di berbagai bidang sangat terasa. Untuk membiayai kebutuhan tersebut tentunya pemerintah membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Salah satu sumber penerimaan pendapatan yang cukup besar berasal dari sektor pajak. Pajak merupakan bagian yang potensial bagi pembangunan sebagai penerimaan negara maupun daerah. Oleh sebab itu peran aktif dari masyarakat sangat dibutuhkan untuk kepentingan pembangunan.

Menurut Halim (2004) Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi menjadi empat jenis pendapatan, yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di⁵ahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Salah satu jenis pendapatan pajak daerah adalah berasal dari pajak kendaraan bermotor (PKB).

Pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu komponen pajak daerah yang memiliki kontribusi tinggi dalam peningkatan asli daerah. Oleh karenanya, pemungutan penerimaan pajak perlu diupayakan semaksimal mungkin. Menurut Nasution (2003), kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak.

Dalam pemungutan pajak sering dijumpai adanya Tindakan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*), bai²⁰ng dilakukan secara aktif maupun pasif. Faktor yang sering dijumpai dalam penerimaan pajak suatu negara adalah tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah. Hal tersebut dikarenakan tingkat kepatuhan pajak belum merata, hal ini secara tidak langsung mempengaruhi ketersediaan pendapatan belanja negara. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, begitupun sebaliknya.

Belakangan ini kepemilikan Kendaraan bermotor semakin meningkat. Hal tersebut berdampak pada bertambahnya jumlah wajib pajak setiap tahunnya. jumlah wajib pajak yang terdaftar di SAMSAT Kota Bogor dari tahun 2016 sampai 2018 selalu mengalami peningkatan.

Jumlah Wajib Pajak kendaraan Bermotor Tahun 2016-2018

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Data Tunggalan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Persentase Wajib Pajak yang menunggak
2016	457.664 WP	8.786 KBM	1,92 %
2017	493.071 WP	9.724 KBM	1,97 %
2018	478.880 WP	13.222 KBM	2,76 %

Sumber : Samsat Kota Bogor 2019

Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor tentu saja memberikan dampak yang positif bagi pemerintah daerah. Karena semakin tinggi tingkat kepemilikan kendaraan bermotor maka diharapkan pajak yang diterima oleh pemerintah dae²n juga semakin meningkat. Akan tetapi dari table di atas terlihat bahwa peningkatan jumlah kendaraan bermotor tidak diimbangi dengan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap pemenuhan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Terlihat pada masa periode 2016-2018 masih ada sekitar 1.92 sampai denga¹³ 76 persen wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya. Oleh karenanya tujuan dari penelitian ini adalah (1) Unt¹¹ mengetahui Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Bogor (2) Unt³ mengetahui Hambatan yang dihadapi dan (3) unt³ mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

II. METODOLOGI

Penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dimana analisis penelitian untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik itu satu variabel ataupun lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara satu variabel dengan variabel lainnya

Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah penunggak wajib kendaraan bermotor tahun 2018 sebanyak 13.222 wajib pajak. Sedangkan Untuk menentukan sample penelitian menggunakan rumus slovin (Ginting, 2008:132) yaitu:

$$\frac{N}{1 + N e^2}$$

Keterangan:

n = ukuran sampel

N = jumlah populasi

e = tingkat presisi = 10 %

24

Maka jumlah sampel yang diperoleh adalah:

$$= \frac{13.222}{1 + \frac{13.222(0,1)^2}{13.222}}$$

$$n = \frac{13.222}{1 + 13.222 \times 0,01}$$

$$n = \frac{13.222}{1 + 132,22}$$

$$n = \frac{13.222}{133,22}$$

$$n = 99,25$$

Dibulatkan menjadi 100

9

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain dengan (a) Studi Lapangan (b) Wawancara Dan (C) Angket. Sedangkan Teknik Analisis data digunakan Weight Mean Score yaitu dilakukan untuk item pertanyaan lalu di buat rata-ratakan niainya. Nilai rata-rata tersebut mencerminkan deskripsi setiap indikator dalam setiap dimensi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dibagi menjadi 3 dimensi sebagai berikut : (a) Kepatuhan untuk mendaftarkan diri (b) Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak (c) Kepatuhan dalam membayar tunggakan pajak

Dimensi Kepatuhan Untuk Mendaftarkan diri

No	Item Pernyataan	M	Kriteria Penilaian
1	Memenuhi persyaratan Subjektif dalam membayar PKB	3,92	Baik
2	Kesediaan untuk membayar sendiri dalam membayar PKB	3,96	Baik
Jumlah		3,94	Baik

Berdasarkan hasil rekapitulasi dimensi kepatuhan untuk mendaftarkan diri, sudah dikatakan baik, karena para wajib sudah memenuhi persyaratan dan bersedia untuk membayar sendiri pajak kendaraan bermotornya.

Dimensi dalam Perhitungan Pajak dan Pembayaran Pajak

No	Alternatif Jawaban	F	(x)	F(x)	$\sum \frac{f(x)}{n1}$
1	Sangat Baik	29	5	145	4
2	Baik	46	4	184	
3	Cukup Baik	21	3	63	
4	Kurang Baik	4	2	8	
5	Sangat Tidak Baik	0	1	0	
Jumlah		100		400	

Berdasarkan hasil rekapitulasi dimensi dalam perhitungan pajak dan pembayar pajak sudah dikatakan baik, karena dapat diketahui bahwa para wajib pajak telah mengetahui dan patuh sesuai jumlah dari yang akan dibayarkan ke SAMSAT Kota Bogor.

Dimensi Kepatuhan dalam Membayar Tunggakan Pajak

No	Item Pernyataan	M	Kriteria Penilaian
1	Wajib Pajak tidak memiliki tunggakan PKB	3.84	Baik
2	Wajib pajak tidak pernah mendapat sanksi	3,8	Baik
Jumlah		3.82	Baik

Berdasarkan rekapitulasi kepatuhan dalam membayar tunggakan pajak, terdapat dua indikator penilaian, yaitu wajib pajak tidak memiliki tunggakan PKB dengan rata-rata nilai 3,84 dan indikator wajib pajak tidak pernah mendapat sanksi dengan rata-rata nilai 3,8. Sehingga kriteria penilaian dari dimensi kepatuhan dalam membayar tunggakan pajak memperoleh nilai 3,82 dengan kriteria baik.

Hal tersebut dapat diartikan bahwa para wajib pajak kendaraan bermotor telah sadar akan tanggung jawabnya membayar pajak kendaraan bermotor (PKB).

Rekapitulasi variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel	Dimensi	Indikator	M	Kriteria Penafsiran
Kepatuhan Wajib Pajak	Mendaftarkan Diri	Memenuhi persyaratan Subjektif	3,92	Baik
		Kesediaan membayar sendiri	3,96	Baik
	Kepatuhan dalam perhitungan	Kepatuhan dalam perhitungan PKB	4	Baik
	Kepatuhan dalam membayar pajak	Tidak memiliki tunggakan	3,84	Baik
		Tidak pernah mendapat sanksi	3,8	Baik
Rata – rata			3.89	Baik

Berdasarkan hasil tabel rekapitulasi tentang kepatuhan wajib pajak di kantor SAMSAT Kota Bogor. Adapun nilai tertinggi yaitu sebesar 4 yaitu kepatuhan dalam perhitungan pajak, yang menunjukkan bahwa wajib pajak telah mengetahui perhitungan pajak kendaraan bermotornya. Terlihat dari nilai rata-rata nilai dari keseluruhan indikator 3,89 dengan kriteria penafsiran baik. Artinya wajib pajak telah patuh dan taat akan tanggung jawabnya membayar pajak, akan tetapi nilai yang tertera bukanlah sebuah patokan bahwa para wajib pajak telah sepenuhnya patuh dan taat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

IV. KESIMPULAN DAN KEBARUAN

Penelitian ini meneliti tentang kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Kota Bogor. Penilaian ini terfokus pada kepatuhan para wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraanya. Analisis dari variabel kepatuhan wajib pajak di kantor SAMSAT Kota Bogor sudah baik, artinya wajib pajak telah sadar akan tanggung jawabnya sehingga para wajib pajak patuh untuk membayar pajak kendaraan bermotornya. Walaupun masih ada beberapa penilaian yang dirasa masih kurang dikarenakan beberapa faktor seperti, kesadaran tentang membayar pajak, dan pengetahuan tentang pajak.

6

V. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2004). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah-Edisi Revisi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Nasution. (2006). *Perpajakan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono (2007), *Metedologi Penelitian*, PT Gramedia Jakarta
- Ariska, Elia Yuni (2016), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor*. (Studi Kasus di Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap Patrang Kabupaten Jember 2016.
- Dewi Kusuma Wardani, Moh. Rifqi Asis (2017), *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sstem SAMSAT Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal Akuntansi* Vol.5 No 12017
- Pratomo Cahyo Kurniawan, Fika Azmi tentang *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2017*
- Putu Aditya Pranata (2015), *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Kewajiban Moral Pada Kepatuhan Wajib Pajak*. Vol 10 No 2 (2015).
- Sri Rahayu dan Ita Salsalina Lingga. (2009). "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung "X)". *Jurnal Akuntansi*, vol.1, no.2, hlm. 119-138
- Data Kantor SAMSAT Kota Bogor dari 2016-2018

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bogor

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	jurnalfc.ustjogja.ac.id Internet	24 words — 1%
2	www.coursehero.com Internet	22 words — 1%
3	repository.radenfatah.ac.id Internet	21 words — 1%
4	ejournal.unikama.ac.id Internet	20 words — 1%
5	repo.bunghatta.ac.id Internet	16 words — 1%
6	docplayer.info Internet	14 words — 1%
7	teamjournalht.files.wordpress.com Internet	14 words — 1%
8	doaj.org Internet	13 words — 1%
9	moam.info Internet	13 words — 1%
10	jurnalbaca.pdii.lipi.go.id Internet	

12 words — 1%

11 etd.repository.ugm.ac.id
Internet

11 words — 1%

12 repository.upi.edu
Internet

11 words — 1%

13 zh.scribd.com
Internet

11 words — 1%

14 download.garuda.kemdikbud.go.id
Internet

10 words — 1%

15 jurnal.unpad.ac.id
Internet

10 words — 1%

16 repository.binadarma.ac.id
Internet

10 words — 1%

17 ejournal.bsi.ac.id
Internet

9 words — 1%

18 repository.unpas.ac.id
Internet

9 words — 1%

19 peraturan.bpk.go.id
Internet

8 words — < 1%

20 repository.um-palembang.ac.id
Internet

8 words — < 1%

21 journal.ubaya.ac.id
Internet

6 words — < 1%

22 openjournal.unpam.ac.id

Internet

6 words — < 1%

23

www.slideshare.net

Internet

6 words — < 1%

24

1library.net

Internet

4 words — < 1%

EXCLUDE QUOTES ON

EXCLUDE SOURCES OFF

EXCLUDE BIBLIOGRAPHY ON

EXCLUDE MATCHES OFF